



Bantuan Hukum untuk Warga Miskin Sleman Telan Anggaran Ratusan Juta

SLEMAN, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berkomitmen memberikan bantuan hukum (bankum) bagi warga miskin yang berpotensi mendapatkan ketidakadilan atas permasalahan hukum. Program itu telah menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman, Purwanti mengatakan bantuan hukum yang dilakukan Pemerintah bagi warga miskin untuk beragam kasus. Tetapi, umumnya seputar pidana pencurian, penganiayaan, persetubuhan, narkoba, penggunaan senjata tajam tanpa izin, penggelapan, perceraian, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) industrial. Sejauh ini pihaknya belum pernah mendapat aduan seputar kasus mafia tanah yang belakangan marak terjadi.

"Kasus sengketa tanah belum pernah ada yang mengajukan bantuan hukum untuk orang miskin," kata Purwati yang kerap disapa Ipung, Selasa (29/4).

Ipung bercerita, bantuan hukum ini telah dilakukan sejak Agustus 2022. Pagu

anggaran program ini menggunakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Selain hukum, JPS juga diperuntukkan untuk bantuan pendidikan, kesehatan dan sosial.

Sejak tahun 2022 hingga sekarang, realisasi anggaran yang telah disalurkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp695.300.000 dengan jumlah pemohon layanan bantuan hukum sebanyak 388 orang. Setiap tahun jumlah pemohon bantuan hukum ini cenderung terus meningkat.

"Bantuan hukum dari Januari sampai April 2025 ini sudah sebanyak 45 kasus. Mayoritas pidana pencurian," ujar dia.

Bantuan Hukum bagi warga miskin ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Satu di antaranya, melalui layanan inovasi Bahu Teman (bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. (rif)